

# PANCASILA: SEJARAH, FILSAFAT DAN DASAR NEGARA

Andreas A. Yewangoe

---

## I. Sejarah Pancasila

### a. Adakah yang membahas Pancasila sebelum Bung Karno?

Saya mendasarkan pembahasan ini atas pidato Bung Karno yang diucapkan di depan “Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” pada 1 Juni 1945. Saya menganggap inilah sumber otentik untuk memahami sejarah terciptanya Pancasila. Memang pernah ada tulisan-tulisan lain yang mengatakan bahwa Bung Karno bukan satu-satunya yang mempidatikan dasar Negara Pancasila. Telah ada pembicara-pembicara terdahulu. Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru mengatakan, bahwa Bung Karno hanya menemukan “nama” Pancasila, bukan Pancasila itu sendiri. Tetapi pandangan ini telah ditolak oleh beberapa ahli lainnya. Sebuah studi kritis mengenai pokok ini berasal dari RM. A. B. Kusuma, Peneliti Senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (BP Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016, halaman 16) ia menyimpulkan sebagai berikut: “Dapat disimpulkan bahwa kesaksian Bung Hatta, Dr. Radiman, Mr. M. Yamin dan sejumlah anggota BPUPK serta didukung oleh notulen yang otentik menyatakan bahwa **Ir. Sukarno adalah pencetus pertama Pancasila Dasar Negara**. (garis tebal dari penulis buku). Bukti lain adalah: 1. Dokumen yang berasal dari “Masa Reses” juga memuat usul para anggota BPUPK tentang “Dasar” yang menunjukkan bahwa tidak ada anggota yang mengusulkan Dasar yang terdiri dari lima sila. 2. Prof. Supomo cs pada tanggal 15 Juni 1945, mengusulkan rancangan UUDS yang mengemukakan dasar negara adalah “Kebangsaan” dan “Ketuhanan”, bukan lima dasar. 3. Mr. M. Yamin dalam karangannya yang dimuat di Asia Raya tanggal 22 Juni 1945 mengusulkan 2 dasar yakni Kebangsaan dan Agama, bukan “dasar” yang berjumlah lima.

Dalam studi hermeneutis tentang lahirnya Pancasila, Daniel Dhakidae membuktikan bahwa Mohammad Yamin sebagai pembicara sebelum Bung Karno mengacaukan antara “bentuk” dan “dasar” negara. Hal itu terungkap dalam “dialog” antara R.P. Soeroso yang memimpin sidang waktu itu. R.P. Soeroso: “Tuan pembicara saya rasa *salah paham*. Sebagaimana diterangkan oleh tuan Ketua, Tuan Radjiman, tadi yang dibicarakan ialah *dasar-dasarnya* Indonesia Merdeka. Kalau saya dengarkan yang selanjutnya tadi ini juga tentang *bentuknya* Indonesia Merdeka. Kalau sekiranya sudah cukup hendaklah membicarakan dasar-dasar itu. Sekarang tuan saya persilahkan.” Yamin kemudian melanjutkan pidatonya mengenai “*pembelaan negara, budi pekerti negara, dan kesejahteraan negara*”. Atas hal itu Soeroso lagi-lagi melakukan interupsi. Soeroso: “Saya rasa Tuan *menyimpang dari apa yang dimaksudkan...*” dan seterusnya. Daniel Dakhidae, setelah pembahasan mendalam dan memperbandingkan berbagai teks kemudian tiba pada kesimpulan sebagai berikut: “Untuk keperluan itu, saya telah

berusaha memeriksa teks sebanyak mungkin, kritik interen dalam arti hubungan intertekstual dari teks pidato Yamin itu sendiri. Protes keras ketua sidang *Dokuritsu Junbi Chosa-kai* bahwa apa yang dikatakan Yamin “salah paham” dan “menyimpang dari apa yang dimaksudkan”, karena dia berbicara tentang “bentuk” negara dan bukan “dasar”, maka bisa ditafsirkan bahwa semua “peri” yang dikemukakannya-peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kemanusiaan- tidak diucapkan di dalam sidang besar Badan Persiapan Kemerdekaan, dan ini tidak lain berarti dokumen itu palsu belaka’ (Daniel Dhakidae, “Lima Bulan yang Menggoncang Dunia” dalam, *Prisma*, Jurnal pemikiran Sosial Ekonomi, LP3ES, Volume 37, 2018, pp. 3-31).

#### **b. Menelaah Pidato Bung Karno**

Dari apa yang dikemukakan di atas, rasanya cukuplah alasan untuk melihat pidato Bung Karno sebagai yang otentik berbicara tentang Pancasila. Kita akan mencoba menelaahnya secara garis besar. Kita akan mendasarkan pembahasan ini atas pidato yang didokumentasikan di dalam “Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945”, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995).

Bung Karno menyatakan, ia akan menjawab permintaan Ketua tentang dasar negara. Beliau juga mengkonstatir bahwa pembicara-pembicara terdahulu justru tidak menjawab permintaan Ketua. Yang diminta adalah *Philosophische grondslog* (istilah bahasa Belanda), yang berarti “pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”

Sebelum ia melanjutkan penjelasannya yang sudah tentu mengekspresikan dasar filosofis dari “ada”nya negara (gedung Indonesia Merdeka), ia mempertanyakan secara mendalam tentang kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Menurut Bung Karno, untuk merdeka itu tidak usah harus “jelimet” (*zwaarwichtig*). Artinya harus siap sesiap-siapnya baru mau merdeka. Dengan mengacu kepada pengalaman bangsa-bangsa di dunia, kendati belum siap 100 persen, *tokh* mereka merdeka. Merdeka (*politieke onafhankelijkheid*, kemerdekaan politik) itu adalah jembatan emas menuju masyarakat adil makmur. “...di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat...”. Maka semboyan kita, seru Bung Karno, “INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Pertanyaan yang ada di hadapan kita sekarang, kata Bung Karno, kita ini berani merdeka atau tidak? Apa lagi, lanjut Bung Karno, hukum internasional (*internationaalrecht*) menggampangkan pekerjaan kita. Syarat untuk diakui sebagai negara, tidak *jelimet*. Syaratnya sekadar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh.

Maka atas dasar tekad itu, Bung Karno berbicara tentang *dasar*. Itulah *Philosophische grondslog*. Bung Karno juga memakai istilah bahasa Jerman, *Weltanschauung*. (catatan saya: Istilah ini dapat diterjemahkan dengan “Pandangan dunia”, “world view”, atau seperangkat keyakinan tentang pandangan diri tiap manusia individual di dalam masyarakat dan/atau alam-semesta. Dengan

demikian, *Weltanschauung* juga mengacu kepada jati diri seseorang atau komunitas atau bangsa). Banyak negara di dunia didirikan atas dasar *Weltanschauung* itu, seperti misalnya Hitler yang mendirikan Jerman di atas “national-sozialistische Weltanschauung”, Lenin mendirikan negara Sovyet di atas “Marxistische, Historisch-Materialistische Weltanschauung”, dan seterusnya. Kalau begitu, tanya Bung Karno, “Apakah ‘Weltanschauung’ kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Tetapi tentu saja *Weltanschauung* itu tidak jatuh begitu saja dari langit. Atau ujug-ujug terus ada *Weltanschauung*. Itu harus sudah tersedia berpuluh-puluh tahun berdasarkan pengalaman dari bangsa-bangsa di dunia.

Menurut Bung Karno, *Weltanschauung* itu harus disetujui oleh semuanya. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Sudah tentu tidak. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Negara yang disepakati bersama baik oleh “kaum Islam” maupun oleh “kaum kebangsaan”. Maka yang kita dirikan adalah satu Negara Kebangsaan Indonesia. Bung Karno menyebutnya juga *nationale staat*.

Tetapi untuk tiba di sana, perlu dipertanyakan lebih dahulu apa yang disebut “bangsa”. Bung Karno mengutip dua orang ahli. Ernest Renan berpendapat, bangsa ialah ‘kehendak untuk bersatu’ (“*le desir d’etre ensemble*”). Mereka adalah “gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.” Ahli lain yang dikutipnya adalah Otto Bauer, di dalam bukunya *Die Nationalitätenfrage, “Was ist eine Nation?”* (Apakah bangsa?). “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*” (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib). Memang yang tinggal di Nusantara ini adalah bangsa-bangsa. Maka bangsa Indonesia adalah sebuah *novum*, sesuatu yang baru. Namun mereka berkehendak untuk bersatu karena mereka mempunyai kesatuan nasib. Tetapi itu saja tidak cukup. Tidak cukup hanya kehendak untuk bersatu dan persatuan nasib. Yang hidup di Nusantara bukan hanya suku Bugis, atau suku Jawa, dan seterusnya. Mereka belum bisa disebut bangsa Indonesia. “Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah swt, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian.” Itulah Negara Kebangsaan, *nationale staat*.

### c. Filosofische grondslag dijabarkan lebih jauh

Atas dasar penjelasan tentang *nationale staat* tadi Bung Karno mengusulkan dasar negara yang pertama: “Kebangsaan Indonesia”. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Inilah prinsip kebangsaan. Tetapi prinsip ini, kata Bung Karno ada bahayanya. Bisa ia mengarah ke *chauvinisme*, sehingga berfaham “Indonesia Ueber Alles”. Tidak boleh begitu. Kita harus menuju kepada persatuan dunia. “Kita bukan saja mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.” Bung Karno menyebutnya sebagai *filosofisch principe* nomor dua. Atau disebutnya pula sebagai, “internasionalisme”. Ada

relasi dialektis antara “nasionalisme” dengan “internasionalisme”. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme.”

Lalu apakah dasar yang ketiga? Bung Karno menyebutnya “mufakat”. Sekali lagi beliau menekankan bahwa kita mendirikan negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Beliau yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Semua yang belum memuaskan dapat dibicarakan di dalam permusyawaratan. Di dalam Badan Perwakilan dibicarakan tuntutan-tuntutan kita. Misalnya, Islam dapat membicarakannya di dalam Badan Perwakilan itu. Dengan kata-kata lain, inilah prinsip musyawarah.

Prinsip keempat adalah kesejahteraan. “...tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka.” Dalam kaitan ini beliau mengingatkan bahwa *politieke democratie* (demokrasi politik) saja tidak cukup. Kita membutuhkan *economische democratie* (demokrasi ekonomi). Memperhatikan pengalaman negara-negara di Eropa yang hanya menekankan demokrasi politik, maka dengan mudah sekali timbul ketidakadilan sosial (*sociale onrechtvaardigheid*). Kaum buruh yang mempunyai hak politik di dalam Parlemen misalnya, dengan mudah esoknya dibuang ke jalan raya, dibuat nganggur (*werkloos*) karena absennya demokrasi ekonomi.

Bung Karno menyimpulkan, kita sudah mempunyai 4 (empat) prinsip yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme, atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial. Tetapi itu saja belum cukup. Dibutuhkan “Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Itulah prinsip Ketuhanan. “Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri.” Beliau menegaskan, “segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tidak ada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Dengan mengemukakan ini, Bung Karno mau menegaskan sikap toleransi (*verdraagzaamheid*) di antara para penganut agama yang berbeda-beda itu. Pendeknya, prinsip kelima dari negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.” Sebagai demikian, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan ber-Tuhan pula!

Semua ini dinamakannya Panca Sila. Bukan Panca Dharma, sebab yang disebut terakhir ini diartikan sebagai lima kewajiban. Pada hal yang dibicarakan adalah dasar. *Panca* artinya *lima*. *Sila* artinya *asas* atau *dasar*. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kata Bung Karno.

Panca Sila kemudian diperasnya menjadi *Tri Sila*. “Kebangsaan” dan “Perikemanusiaan” diperas menjadi *socio-nationalisme*. Sementara dua sila berikut, diperasnya menjadi *socio-democratie*. “Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain.” Tri Sila kemudian diperasnya lagi menjadi “Gotong royong” yaitu sebuah istilah Indonesia yang tulen. Bung Karno memahami gotong royong sebagai sebuah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”. Di dalam gotong royong digambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu *karo*, satu *gawe*.

Pidato Ir. Sukarno ini disambut dengan gegap gempita. Tepuk tangan riuh rendah dari segenap hadirin.

#### **d. Piagam Djakarta atau Pancasila 22 Juni 1945**

Menurut buku yang disusun oleh BPIP berjudul, *Pancasila, Historisitas dan Masa Depan Bangsa* (oleh Prof. FX Adji Samekto, cs., Jakarta, 2019), sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Panca Sila telah mengalami perkembangan yaitu menghasilkan Naskah Piagam Djakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Naskah tersebut disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945 oleh “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” dengan menghilangkan kata-kata: “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*”

BPIP menyifatkan “Piagam Djakarta” sebagai “Pancasila 22 Juni 1945”, di mana “Panitia Sembilan” diberi tugas merumuskan gagasan tentang *dasar* negara, batas-batas wilayah, konstitusi, dan hubungan luar negeri.

Panitia Sembilan itu terdiri dari: 1. Soekarno (Ketua); 2. Mohammad Hatta (Wakil Ketua); Achmad Soebardjo (anggota); 4. Muhammad Yamin (anggota); 5. K.H. Wachid Hasjim (anggota); 6. Abdoel Kahar Muzakir (anggota); 7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota); 8. H.Agoes Salim (anggota); 9.A.A.Maramis (anggota).

Tentulah timbul perdebatan yang hangat di antara golongan Islam dan golongan nasionalis sebagaimana telah dicatat oleh buku-buku sejarah. Namun demikian mereka berhasil merumuskan Pancasila menurut versi 22 Juni 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial.

Terlihat bahwa rumusan ini memang didasarkan atas pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu tetapi dengan berbagai penyempurnaan. Misalnya dalam pidato Bung Karno, prinsip Ketuhanan ditempatkan pada bahagian akhir. Di sini justru disebutkan sebagai sila pertama tetapi dengan tambahan, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”.

#### e. Pancasila 18 Agustus 1945

Menurut catatan sejarah sehari setelah proklamasi kemerdekaan ketika Konstitusi hendak didiskusikan, Mohammad Hatta menerima pesan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Mereka berkeberatan atas formulasi, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Menurut para tokoh tersebut dengan rumusan itu terkesan diskriminatif terhadap kelompok non-muslim.

Dalam sikap kenegarawanan dan dengan visi yang jelas mengenai nasib negara dan bangsa di masa-masa mendatang, Muhammad Hatta melakukan percakapan dengan tokoh-tokoh Muslim. Menurut catatan Prof. Adji cs guna menjaga integrasi bangsa, Soekarno segera menghubungi Muhammad Hatta dan wakil-wakil golongan Islam. Tentu terjadilah perdebatan yang panas. Namun mereka *tokh* tiba pada kesepakatan untuk mengubah sila pertama menjadi, *Ketuhanan yang Maha Esa*.

Selanjutnya kita menemukan rumusan mengenai Pancasila sebagaimana diabadikan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, “... maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Inilah rumusan yang dianggap final dan resmi. Masih beberapa kali rumusan Pancasila dimodifikasi yaitu dalam periode Republik Indonesia Serikat (Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950); Pancasila di periode Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950-5 Juli 1959); Pancasila di periode Demokrasi Terpimpin; Pancasila di era Orde Baru. Namun pada akhirnya kita kembali kepada rumusan final dan resmi sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945.

## II. Beberapa Permasalahan yang Timbul Sekitar Pancasila

Dalam perjalanannya yang panjang tidak jarang Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Segera setelah Orde Baru jatuh, pada saat itu juga Pancasila dilupakan. Penataran P4 yang sangat doktriner dan *top down* mungkin telah menjadi trauma tersendiri bagi banyak orang. Terjadilah kekosongan ideologi. Pada saat kekosongan ini masuklah berbagai ideologi lain yang bukan saja berbeda dengan Pancasila melainkan bertentangan. Muncullah berbagai pertanyaan, seperti misalnya, bagaimanakah relasi antara Pancasila dan agama. Tidak jarang keduanya dipertentangkan dan dengan demikian orang didorong untuk memilih salah satunya, “agama” atau “Pancasila”. Agama diyakini berasal dari Tuhan sedangkan Pancasila hanyalah rumusan manusia belaka. Anas Saidi mencatat, bahwa dalam tataran sosiologis ternyata terjadilah ketegangan paling permanen antara agama dan Pancasila. Sebagai sumber nilai dan sistem simbolik, keduanya saling memperebutkan dalam mencari pengikut dan mendefinisikan realitas. Pada hal, demikian Saidi, agama dan Pancasila sesungguhnya bisa saling

mengisi dan bekerjasama memperkuat moralitas bangsa tanpa harus memperebutkan arena yang garis demarkasinya sudah jelas (Anas Saidi, “Politik Identitas Keagamaan, Pancasila dan Dilemma Keagamaan”, dalam *Prisma*, LP3ES, Volume 37, 2018, p.63).

Dari persepektif iman Kristen, Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai yang dianut di dalam kekristenan justru terungkap secara kontekstual dalam Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya pasti tidak bertentangan dengan keyakinan Kristen akan Tuhan Yang hidup yang menciptakan dan memerintah alam-semesta. Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah mengacu kepada pandangan agama tertentu tentang keesaan Tuhan, melainkan merujuk kepada nilai-nilai religiusitas yang sudah ada dalam agama-agama (lokal) jauh sebelum agama-agama “moderen” memasuki Indonesia. F. Budi Hardiman mengusulkan agar filsafat Pancasila dikembangkan dengan mendialogkan konsep moderen dan berbagai konsep tradisional. Ia lalu menunjuk kepada konsep Ketuhanan. Keberagamaan konsep Ketuhanan, kata dia dalam agama-agama asli Indonesia dan berbagai agama dunia perlu di bawa ke ranah abstrak, bukan untuk menyatukan berbagai konsep itu, melainkan untuk menunjukkan kekayaan pemahaman ketuhanan di Indonesia yang dapat dicakup di dalam sila pertama. (F.Budi Hardiman, “Menggali Pancasila Sebagai Filsafat Politik”, dalam *Prisma*, LP3ES, Volume 37, 2018, p. 37). Dengan demikian, semua agama menjadi setara dengan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengisi pemahaman Ketuhanan Yang Maha Esa itu dengan pemahaman sebagaimana diyakininya di dalam agamanya.

Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sangat sesuai dengan nilai-nilai Kekristenan yang diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Demikianlah seterusnya hingga ke sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tetapi memang kelima sila itu mesti dibaca dan difahami di dalam satu nafas. Kalau tidak akan berbahaya. Atau kalau dilepaskan satu dari pada yang lain, kita akan menemukan tindakan yang bersifat anomali. Bisa saja seseorang sangat beriman kepada Tuhan, tetapi kalau melupakan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka bukan tidak mungkin yang bersangkutan membunuh sesamanya sambil menyebut nama Tuhan. Demikian juga keimanan kepada Tuhan janganlah menempatkan kita kedalam pengkotakan-pengkotakan sehingga menohok sila “Persatuan Indonesia”. Disinyalir bahwa sampai dengan sekarang sila kelima (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) terlampaui dianaktirikan. Artinya, kendati sudah ada upaya-upaya untuk mewujudkan keadilan sosial namun belum kesampaian sebagaimana dicita-citakan. Maka tidaklah berguna beriman kepada Tuhan tetapi pada saat yang sama mengabaikan keadilan bagi sesama. Dalam Kitab Suci Kristen dikenal perintah ini: “*Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu... Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”* (Matius 22: 37-39).

### III. Pancasila Dan Perjalanan Bangsa Ke Masa Depan

Sekarang kita sedang memasuki “Revolusi Industri 4.0” yang sangat dikuasai oleh budaya digital. Konon, Revolusi Industri ini dicirikan oleh “*Artificial Intelligence*” (IA). Sebagai bangsa kita akan memasuki tahun 2045 yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka. Ada yang menamakan saat itu sebagai Indonesia emas. Pada waktu itu Indonesia akan menjadi negara nomor tiga termaju di dunia, demikian prediksinya. Pada pihak yang lain, tahun 2050 diramalkan sebagai terjadinya lompatan-lompatan signifikan dalam peradaban. Hal ini antara lain dikatakan oleh Dr. Yuval Noach Harari, Guru Besar Sejarah pada Hebrew University di Yerusalem. Ia adalah penulis dua buku *best seller*, *Sapiens* dan *Homo Deus*. Ada bukunya yang lain berjudul, *21 Lessons for 21st Century*. Ia mencatat, ketika Revolusi Industri 1.0 timbul di abad ke-19 dengan temuan mesin uap oleh James Watt, terjadilah goncangan-goncangan yang mengguncang sendi-sendi masyarakat dan gereja (boleh dibaca: agama). Tetapi dalam masa-masa itu muncul pula 3 (tiga) ideologi besar yaitu: komunisme, sosialisme dan liberalisme. Dua ideologi yang disebutkan pertama sudah mati. Liberisme sedang “bingung” dengan tumbul dan berkembangnya budaya digital. Bahkan kita sekarang sedang memasuki “*digital dictatorship*” di mana manusia ditempatkan pada sikap menjalani hidup yang deterministik. Artinya tidak ada lagi orang dan bidang kehidupan yang dengan bebasnya berlangsung tanpa ditentukan oleh peradaban digital. Kalau ideologi-ideologi besar dan dikenal itu sudah dan atau bahkan menghadapi kematian, maka pertanyaan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah, adakah ia bertahan menghadapi masa depan yang keras itu? Ataukah ia (Pancasila) juga akan mengalami nasib yang sama dengan ideologi-ideologi sebelumnya? Pertanyaan ini tentu ikut mempertimbangkan juga maraknya berbagai ideologi lain yang masuk ke negeri ini yang bertentangan dengan Pancasila. Namun pertanyaan tentang tantangan budaya digital itu akan sangat signifikan.

Tentu kita harus yakin bahwa bagaimanapun Pancasila harus tetap hidup dan memberikan energi yang menghidupkan bagi bangsa dan negara ini. Namun harus sangat jelas dirumuskan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pada waktu-waktu lalu, telah ada diskusi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, namun bagaimana kelanjutannya kurang terdengar lagi. Pancasila adalah identitas bangsa kita, demikian dikatakan. Tetapi dengan mengatakan demikian, belum cukup. Identitas bisa sangat statis pengertiannya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Eka Darmaputera berjudul, *Pancasila, Identitas dan Modernitas*. Dengan identitas ia hendak menekankan kepada jatidiri bangsa ini, yang kalau dihilangkan atau diganggu, kita akan terjatuh ke dalam kebingungan karena hilangnya kepribadian kita. Namun demikian, Pancasila pun harus mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang seringkali tidak terbayangkan sebelumnya. Itulah yang disimbolkannya dalam istilah “modernitas”. Ia menegaskan, Pancasila tidak boleh dibiarkan beku. Pancasila harus terus dikembangkan secara kreatif dan dinamis. Hal itu dimaksudkan agar Pancasila dapat menjawab tantangan-tantangan zaman yang terus berubah dan bertambah maju. (Eka Darmaputera,

*Pancasila, Identitas dan Modernitas*, BPK-GM, Jakarta, 2017). Bagaimana melakukan itu, sangat tergantung dari kita.

Kepustakaan:

RM.A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta, 1995;

Prof.Dr.FX.Adji Samekto, cs, *Pancasila, Historisitas dan Masa Depan Bangsa*, BPIP, Jakarta, 2019;

Peter Lewuk, *Pancasila Sebagai Filsafat Kritis*, The AMC, Jakarta, 2017;

*Prisma*, Membongkar dan Merangkai Pancasila, LP3ES, Volume 37, 2018;

Eka Darmaputera, *Pancasila, Identitas & Modernitas*, BPK-GM, Jakarta, 2017.

Jakarta, 24 Oktober

2019